

PEMERATAAN SEBAGAI ARAHAN RENCANA DAN STRATEGI PEMBANGUNAN WILAYAH DI KABUPATEN CIANJUR

Equity as Direction of Regional Development Plans and Strategies in Cianjur Regency

Ganjar Priadi¹, Atang Sutandi² and Muhammad Firdaus³

Diterima: 20 Februari 2018

Disetujui: 17 Agustus 2018

Abstrak: Perencanaan pembangunan dengan pendekatan pemerataan memiliki tujuan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di masa depan. Kabupaten Cianjur memiliki fokus kebijakan pembangunan pada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Berbeda dengan hasil positif dalam pertumbuhan ekonomi, upaya pemerataan pembangunan belum terimplementasikan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah (a) menganalisis tingkat perkembangan wilayah; (b) menganalisis pemerataan pembangunan; (c) menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan; dan (d) merumuskan arahan rencana dan strategi pembangunan wilayah. Metode yang digunakan adalah analisis skalogram, indeks theil, regresi data panel, dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan wilayah di Kabupaten Cianjur mengalami peningkatan IPK, namun didominasi kecamatan berhierarki rendah dengan rata-rata sebesar 61.67%. Kondisi pemerataan mengalami penurunan seiring meningkatnya ketimpangan pembangunan antarwilayah. Pembangunan di Kabupaten Cianjur secara signifikan dipengaruhi oleh persentase rumah tangga pengguna listrik, kepadatan penduduk, dan jumlah keluarga miskin. Rencana dan strategi pembangunan wilayah ke depan harus mempertimbangkan kondisi faktual yang terjadi guna terciptanya pemerataan diseluruh wilayah.

Kata kunci: Pemerataan, Pembangunan Wilayah, dan Skalogram

Abstract: Development planning with equalization approach has a purpose to create sustainable and equitable development in the future. Cianjur Regency has a focus of development policy on economic growth and equity. Different from positive results in economic growth, equitable development efforts have not been implemented properly. This study was aimed to (a) analyze the level of regional development; (b) analyze equalization of development; (c) determine factors affecting development; and (d) formulate direction of regional development plans and strategies. The method used are scalogram, theil index, panel data regression, and descriptive analysis. Results of this study indicated regional development in Cianjur Regency experienced an increase in IPK, but dominated by low hierarchy sub-districts with an average of 61.67%. Condition of equity has decreased with increasing inequality of inter-regional development. Development in Kabupaten Cianjur is significantly influenced by percentage of households using electricity,

¹ Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor

² Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor

³ Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor

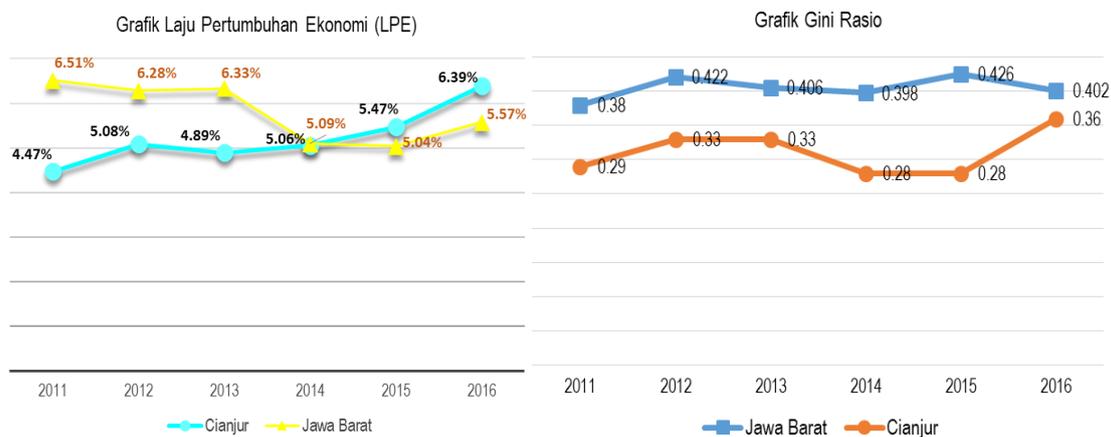
population density, and number of poor families. Future development plans and strategies must take into account factual conditions that occur for the creation of equity throughout the region.

Keywords: Equity, Regional development, and scalogram

PENDAHULUAN

Bahasan tentang pemerataan dalam perencanaan pembangunan sejak lama telah dikonsepsikan. Seiring upaya menurunkan ketimpangan di dalam dan diantara negara sebagai agenda *Sustainable Development Goals (SDGs)*, perencanaan pembangunan dengan pendekatan pemerataan kembali mendapat perhatian negara-negara di dunia. Konsekuensinya pemerataan harus menjadi prinsip penuntun bagi pembangunan masa depan untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan (Herath 2017). Pemerataan pembangunan tidak menyiratkan pembangunan yang sama disemua daerah, melainkan pemanfaatan potensi masing-masing daerah sehingga bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi penduduk diseluruh wilayah (Arsovska 2017). Agenda pembangunan nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah menggariskan dimensi pemerataan dan kewilayahan sebagai strategi pembangunan.

Dalam pemerataan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, Indonesia menempati peringkat ke-36 dari 74 negara berkembang dengan nilai *Inclusive Development Index (IDI)* sebesar 3.95 (World Economic Forum 2018). Jauh di bawah Malaysia pada peringkat ke-13 (*IDI* 4.39), Thailand di peringkat ke-17 (*IDI* 4.24), dan Vietnam di peringkat ke-33 (*IDI* 3.98). Permasalahan ketimpangan berpengaruh negatif terhadap nilai *IDI* Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) gini rasio ketimpangan antargolongan pendapatan penduduk di Indonesia pada bulan September 2017 masih cukup tinggi yakni sebesar 0.391. Selain itu, ketimpangan pembangunan antarwilayah merupakan masalah yang masih harus dihadapi baik dalam tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi maupun antar kepulauan (Firdaus 2013).



Sumber: (Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur 2017), data diolah.

Gambar 1 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Gini Rasio Kabupaten Cianjur tahun 2011-2016

Kabupaten Cianjur sebagai wilayah terluas ke-2 di Provinsi Jawa Barat memiliki fokus kebijakan pembangunan pada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Pada periode tahun 2011-2016, meskipun masih mengalami fluktuasi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

menunjukkan *trend* positif. Bahkan tahun 2015 dan 2016 LPE Kabupaten Cianjur mampu tumbuh di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat. Dilihat dari perbandingan antara LPE dan gini rasio ketimpangan pendapatan antargolongan penduduk di Kabupaten Cianjur (Gambar 1), dalam periode tahun yang sama terdapat kontradiksi antara *trend* positif LPE dengan upaya pemerataan pembangunan. Bahkan pada tahun 2016 gini rasio mengalami kenaikan sebesar 0.08, yang merupakan kenaikan paling tinggi dibandingkan dengan 26 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat.

Semakin melebaranya ketimpangan antargolongan pendapatan penduduk diduga terjadi pula pada semakin melebaranya ketimpangan antarwilayah. Padahal pembangunan wilayah ditujukan untuk mengembangkan sseluruh wilayah ke arah yang lebih baik dengan memanfaatkan potensi wilayah untuk mensejahterahkan seluruh masyarakat (Faruqi *et al.* 2015). Kebijakan pembangunan wilayah yang berorientasi pada pemerataan baik dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011-2031 maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, pada implementasinya seringkali mengalami penyimpangan sehingga upaya pemerataan terkesan stagnan. Oleh karena itu penelitian ini membahas mengenai bagaimana pemerataan sebagai indikator utama dalam pembangunan wilayah dijadikan sebagai arahan rencana dan strategi Pemerintah Daerah dalam menyempurnakan program pembangunan wilayah ke depan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki tujuan: (1) menganalisis tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Cianjur; (2) menganalisis pemerataan pembangunan di Kabupaten Cianjur; (3) menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan di Kabupaten Cianjur; dan (4) merumuskan arahan rencana dan strategi pembangunan wilayah di Kabupaten Cianjur.

METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat dengan wilayah penelitian meliputi 32 kecamatan sebagaimana disajikan dalam Gambar 2. Secara geografis Kabupaten Cianjur berada pada koordinat 106°42'-107°25' Bujur Timur dan 6°2'-7°25' Lintang Selatan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli hingga bulan Desember 2017.

Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder antara lain data jumlah dan jenis fasilitas umum (fasilitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial) dan jarak menuju fasilitas umum dalam Potensi Desa (Podes), data jumlah penduduk, data kepadatan penduduk, dan data persentase keluarga pengguna listrik bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), data jumlah keluarga miskin dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), data produktivitas padi dari Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur, serta Peta Administrasi Kabupaten Cianjur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur.

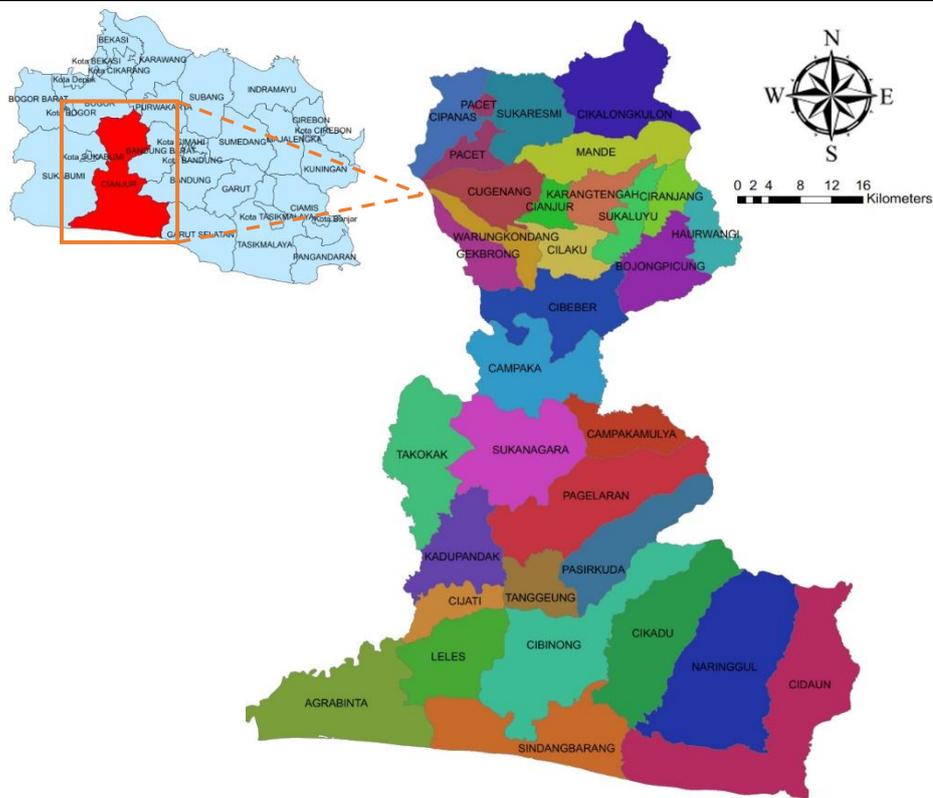
Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab tujuan adalah sebagai berikut:

Tingkat Perkembangan Wilayah

Tingkat perkembangan wilayah dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah komponen wilayah serta penyebarannya (jangkauan spasial) tersebar lebih luas (Panuju dan Rustiadi 2013). Untuk menganalisis tingkat perkembangan wilayah berdasarkan

kelengkapan sarana dan prasarana dapat dianalisis menggunakan metode skalogram (Nusantara 2014). Skalogram dapat mengelompokkan kecamatan berdasarkan tingkat kompleksitas fungsi pelayanan yang dimilikinya, serta menentukan jenis dan keragaman pelayanan dan fasilitas yang terdekat pada pusat-pusat pelayanan dengan berbagai tingkatan (Nofita *et al.* 2016). Jenis data yang digunakan yang digunakan antara lain jumlah penduduk, jarak menuju fasilitas umum, jumlah dan jenis fasilitas umum (fasilitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial). Nilai indikator skalogram digolongkan dalam tiga kelompok yaitu: (a) wilayah hierarki I (tingkat perkembangan tinggi) yaitu wilayah dengan jumlah indeks baku sama dengan nilai rata-ran ditambah standar deviasi ($IPK > (Average + Stdev)$); wilayah hierarki II (tingkat perkembangan sedang) yaitu wilayah dengan jumlah indeks baku lebih besar sama dengan nilai rata-ran ($IPK \geq Average$); dan hierarki III (tingkat perkembangan rendah) yaitu wilayah dengan jumlah indeks baku kurang dari nilai rata-ran ($IPK < Average$).



Gambar 2 Lokasi dan wilayah penelitian

Pemerataan Pembangunan

Pemerataan pembangunan ditunjukkan dengan ada atau tidaknya ketimpangan wilayah. Semakin kecil nilai ketimpangan menunjukkan semakin meratanya pembangunan. Metode Indeks Theil dipilih untuk mengukur ketimpangan karena mempunyai kelebihan dalam mendekomposisi ketimpangan dalam wilayah dan ketimpangan antar wilayah (Sinha dan Rastogi 2015) dan (Yu *et al.* 2015). Selain itu, Indeks Theil juga bisa disesuaikan dengan baik untuk penelitian lain tidak hanya untuk menghitung ketimpangan pendapatan (Lu *et al.* 2017), seperti menghitung ketimpangan *Regional Development Index* (RDI) oleh Schrott *et al.* (2015). Data yang digunakan dalam

mengukur tingkat ketimpangan pembangunan adalah Indeks Perkembangan Kecamatan (IPK) hasil analisis skalogram dan jumlah penduduk tahun 2003, 2006, 2008, 2011, dan 2014. Rumus Indeks Theil dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$I_{Theil} = \sum (y_j/Y) \cdot \log[(y_j/Y)/X_j/X]$$

Dimana:

I_{Theil}	=	Jumlah keseluruhan ketimpangan di Kabupaten Cianjur (Indeks Theil)
y_j	=	IPK di kecamatan ke- j
Y	=	IPK di Kabupaten Cianjur
x_j	=	Jumlah penduduk di kecamatan ke- j
X	=	Jumlah penduduk Kabupaten Cianjur

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembangunan

Perkembangan pola dan struktur wilayah secara umum sangat dipengaruhi oleh faktor fisik internal terdiri dari keadaan geografis, topografi, fungsi kota, sejarah dan kebudayaan, dan unsur-unsur umum lainnya seperti jaringan jalan, penyediaan air bersih dan jaringan penerangan listrik yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat (Febrianty *et al.* 2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan di Kabupaten Cianjur menggunakan metode regresi data panel statis. Pendekatan data panel merupakan gabungan antara pendekatan *cross section* dan *time series* (Firdaus 2011). Metode data panel memiliki dua pendekatan, yaitu *Fixed Effect Model (FEM)* dan *Random Effect Model (REM)*. Keduanya dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya korelasi antara komponen *error* dengan peubah bebas. Pengujian terhadap asumsi ada tidaknya korelasi antara regresor dan efek individu digunakan untuk memilih apakah *fixed* atau *random effects* yang lebih baik menggunakan *Hausman Test* (Prasetyo dan Firdaus 2009).

Variabel *dependent* yang digunakan adalah Indeks Perkembangan Kecamatan (IPK) karena dapat mencerminkan kapasitas wilayah dan paling mudah dinilai dalam menghitung kapasitas wilayah (Rustiadi *et al.* 2011). Variabel *independent* yang digunakan yaitu produktivitas padi, kepadatan penduduk (Giannias *et al.* 2000), jumlah keluarga miskin, dan persentase rumah keluarga pengguna listrik. Data yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 32 kecamatan di Kabupaten Cianjur ($i=32$), dengan 5 titik waktu analisis ($t=5$) yakni tahun 2003, 2006, 2008, 2011, dan 2014. Semua variabel dalam nilai logaritma natural. Model penelitian dinyatakan dengan:

$$IPK_{it} = \alpha + \beta_1 AGRI_{it} + \beta_2 ELECTRIC_{it} + \beta_3 POP_{it} + \beta_4 POOR_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

IPK	:	Indeks Perkembangan Kecamatan
AGRI	:	Produktivitas padi
ELECTRIC	:	Persentase rumah tangga pengguna listrik
POP	:	Kepadatan penduduk
POOR	:	Jumlah keluarga miskin

Arahan Rencana dan Strategi Pembangunan Wilayah

Penyusunan arahan rencana dan strategi pembangunan wilayah dilakukan secara deskriptif berdasarkan hasil kajian analisis perkembangan wilayah, kondisi pemerataan pembangunan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan di Kabupaten Cianjur. Selanjutnya, dilakukan integrasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011-2031 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 sehingga menghasilkan arahan dan rencana dan strategi terhadap kebijakan pembangunan wilayah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat perkembangan wilayah

Tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Cianjur dapat dilihat dari Indeks Perkembangan Kecamatan (IPK) dan hierarki wilayah masing-masing kecamatan hasil analisis skelogram sebagaimana disajikan dalam Tabel 1. Dalam rentang waktu 2003-2014 nilai IPK masing-masing kecamatan mengalami fluktuasi namun secara keseluruhan memiliki perkembangan positif. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya nilai rata-rata, nilai terendah dan nilai tertinggi dari kondisi tahun 2003 hingga kondisi tahun 2014. Rata-rata IPK sebesar 41.8 di tahun 2003 naik 10% menjadi 45.9 di tahun 2014. Nilai terendah naik sebesar 40% dari 21.7 di tahun 2003 menjadi 30.4 di tahun 2014. Sementara nilai tertinggi naik sebesar 50% dari 77.7 di tahun 2003 menjadi 116.6 di tahun 2014. Kondisi tersebut menggambarkan perkembangan wilayah di Kabupaten Cianjur memiliki tren positif melalui pembangunan sarana dan prasarana wilayah diseluruh kecamatan. Sesuai dengan penelitian Rahman (2009) yang menyebutkan kenaikan IPK disebabkan oleh penambahan jumlah dan jenis fasilitas pada suatu wilayah sehingga indeks perkembangannya menjadi meningkat, dan pada tingkat yang tinggi dapat disertai dengan peningkatan hierarki. Sedangkan penurunan IPK disebabkan oleh tidak terjadinya penambahan jumlah dan jenis fasilitas pada wilayah tersebut atau walaupun terjadi penambahan jumlahnya masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan penambahan jumlah maupun jenis fasilitas di wilayah lain.

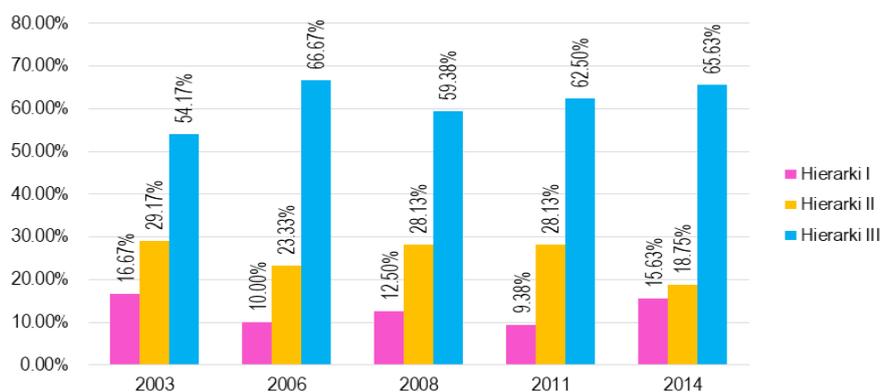
Tabel 1. Ringkasan Nilai IPK dan Hierarki Wilayah Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Cianjur

Kecamatan	IPK dan Hierarki Wilayah per-Tahun									
	2003		2006		2008		2011		2014	
<u>WP Utara</u>										
Cianjur	75.6	I	96.2	I	106.0	I	120.0	I	116.6	I
Ciranjang	63.0	I	74.6	I	69.9	I	72.9	I	68.1	I
Pacet	77.7	I	59.1	II	65.9	I	52.3	II	66.5	I
Cipanas	*)	*)	107.6	I	79.9	I	68.4	I	60.6	II
Karangtengah	54.8	II	43.9	II	44.9	II	54.2	II	54.7	II
Cilaku	63.8	I	56.7	II	43.7	II	56.2	II	47.6	III
Cibeber	50.5	II	41.6	III	33.5	III	41.9	III	46.7	III
Mande	50.8	II	38.0	III	37.2	III	44.5	III	43.2	III
Bojongpicung	50.5	II	32.1	III	41.2	II	42.1	III	37.0	III
Haurwangi	*)	*)	*)	*)	39.2	III	46.5	III	40.7	III
Cugenang	43.1	II	35.9	III	39.5	III	44.7	III	40.3	III
Sukaluyu	40.8	III	54.3	II	40.5	III	51.9	II	39.5	III
Cikalongkulon	43.3	II	38.3	III	44.1	II	46.6	III	37.3	III
Sukaresmi	30.8	III	31.5	III	39.5	III	58.4	II	34.9	III
Warungkondang	40.9	III	36.6	III	51.5	II	49.9	II	44.0	III
Gekbrong	*)	*)	26.0	III	27.1	III	42.9	III	32.7	III
<u>WP Tengah</u>										
Campaka	38.2	III	26.8	III	33.6	III	42.55	III	35.8	III
Campakamulya	*)	*)	43.0	II	48.18	II	65.01	II	73.1	I
Tanggeung	34.4	III	30.7	III	38.94	III	58.92	II	56.3	II
Kadupandak	27.3	III	22.9	III	33.36	III	40.02	III	52.0	II
Cijati	*)	*)	36.5	III	54.01	II	55.13	II	68.1	I
Takokak	21.7	III	40.4	III	34.55	III	42.71	III	39.5	III
Sukanagara	47.2	II	44.7	II	44.73	II	38.66	III	38.9	III
Pagelaran	31.6	III	34.5	III	47.3	II	44.89	III	38.3	III
Pasirkuda	*)	*)	*)	*)	33.7	III	44.6	III	54.8	II
<u>WP Selatan</u>										
Cibinong	33.3	III	22.1	III	20.46	III	27.77	III	41.0	III

Kecamatan	IPK dan Hierarki Wilayah per-Tahun									
	2003		2006		2008		2011		2014	
Sindangbarang	29.2	III	31.0	III	32.35	III	35.03	III	39.9	III
Naranggal	36.2	III	30.7	III	26.84	III	42.04	III	35.8	III
Cikadu	-*)	-*)	19.7	III	32.59	III	29.54	III	34.3	III
Cidaun	26.8	III	50.1	II	35.07	III	34.48	III	33.7	III
Agrabinta	28.8	III	21.6	III	25.14	III	27.08	III	30.4	III
Leles	-*)	-*)	39.1	III	41.22	III	62.56	III	55.1	II
Terendah	21.7		19.7		20.5		27.1		30.4	
Tertinggi	77.7		107.5		106.0		120.0		116.6	
Rataan	41.8		42.1		43.3		49.5		45.9	
Standar Deviasi	13.6		20.3		17.0		17.0		11.9	

Keterangan: *) Kecamatan yang belum mengalami pemekaran dari kecamatan induknya yakni Cipanas (Pacet), Gekbrong (Warungkondang), Campakamulya (Campaka), Cijati (Kadupandak), Leles (Agrabinta), Cikadu (Cibinong), Haurwangi (Bojongpicung), dan Pasirkuda (Pagelaran).

Berdasarkan persentase hierarki wilayah sebagaimana disajikan dalam Gambar 3, dalam kurun waktu 2003 hingga 2014 Kabupaten Cianjur dapat digolongkan kedalam wilayah dengan tingkat perkembangan rendah. Hal ini disebabkan pada setiap titik tahun analisis sebagian besar kecamatan-kecamatan memiliki hierarki III (tingkat perkembangan rendah) dengan rata-rata 61.67%. Jumlah kecamatan yang berhierarki I (tingkat perkembangan tinggi) rata-rata hanya 12.83%, dan 25.50% lainnya adalah kecamatan-kecamatan dengan hierarki II (tingkat perkembangan sedang). Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator ketidakmampuan Kabupaten Cianjur dalam memajukan wilayah sehingga termasuk kategori daerah “tertinggal” apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Cianjur memiliki ketersediaan sarana prasarana kurang lengkap. Menurut Firmansyah *et al.* (2014), dilihat dari indikator penyebaran fasilitas sosial, kecamatan dengan kategori kurang lengkap di Kabupaten Cianjur berjumlah 25 kecamatan (78.12%). Hanya ada 1 kecamatan (3.12%) yang termasuk kategori lengkap yaitu Kecamatan Cianjur, sedangkan 6 kecamatan (18.75%) lainnya termasuk kategori sedang.



Gambar 3. Grafik Persentase Hierarki Wilayah Tahun 2003, 2006, 2008, 2011, dan 2014

Hasil analisis tingkat perkembangan wilayah Kabupaten Cianjur yang diukur dengan pendekatan sarana prasarana wilayah memiliki keselarasan dengan hasil penelitian lain yang menganalisis tingkat perkembangan wilayah melalui pendekatan sosial-ekonomi. Pravitasari (2009) menganalisis perkembangan wilayah kabupaten/kota di Pulau Jawa melalui indikator sosial-ekonomi pada masa sebelum dan setelah diberlakukannya otonomi daerah. Pada masa sebelum otonomi daerah (tahun 1986-1999) Kabupaten Cianjur

dikategorikan kedalam kuadran III atau wilayah relatif terbelakang dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per kapita. Setelah masa otonomi daerah (tahun 2000-2007) Kabupaten Cianjur masih tetap berada dalam kuadran tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan wilayah di Kabupaten Cianjur cenderung stagnan, bahkan setelah 15 tahun diberlakukannya otonomi daerah.

Dilihat dari perbandingan sebaran spasial hierarki wilayah (Gambar 4), dalam kurun waktu 2003 hingga 2014 kecamatan-kecamatan yang memiliki tingkat perkembangan tinggi (hierarki I) sebagian besarnya berada di WP Utara. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan masih terkonsentrasi hanya di beberapa kecamatan terutama di WP Utara. Sesuai penelitian Firmansyah *et al.* (2014) yang menyebutkan bahwa berdasarkan indikator penyebaran fasilitas sosial, sebagian besar kecamatan-kecamatan tergolong wilayah maju berada di wilayah utara, sedangkan kecamatan-kecamatan di wilayah tengah dan selatan sebagian besar tergolong wilayah berkembang dan tertinggal.

Pemerataan Pembangunan

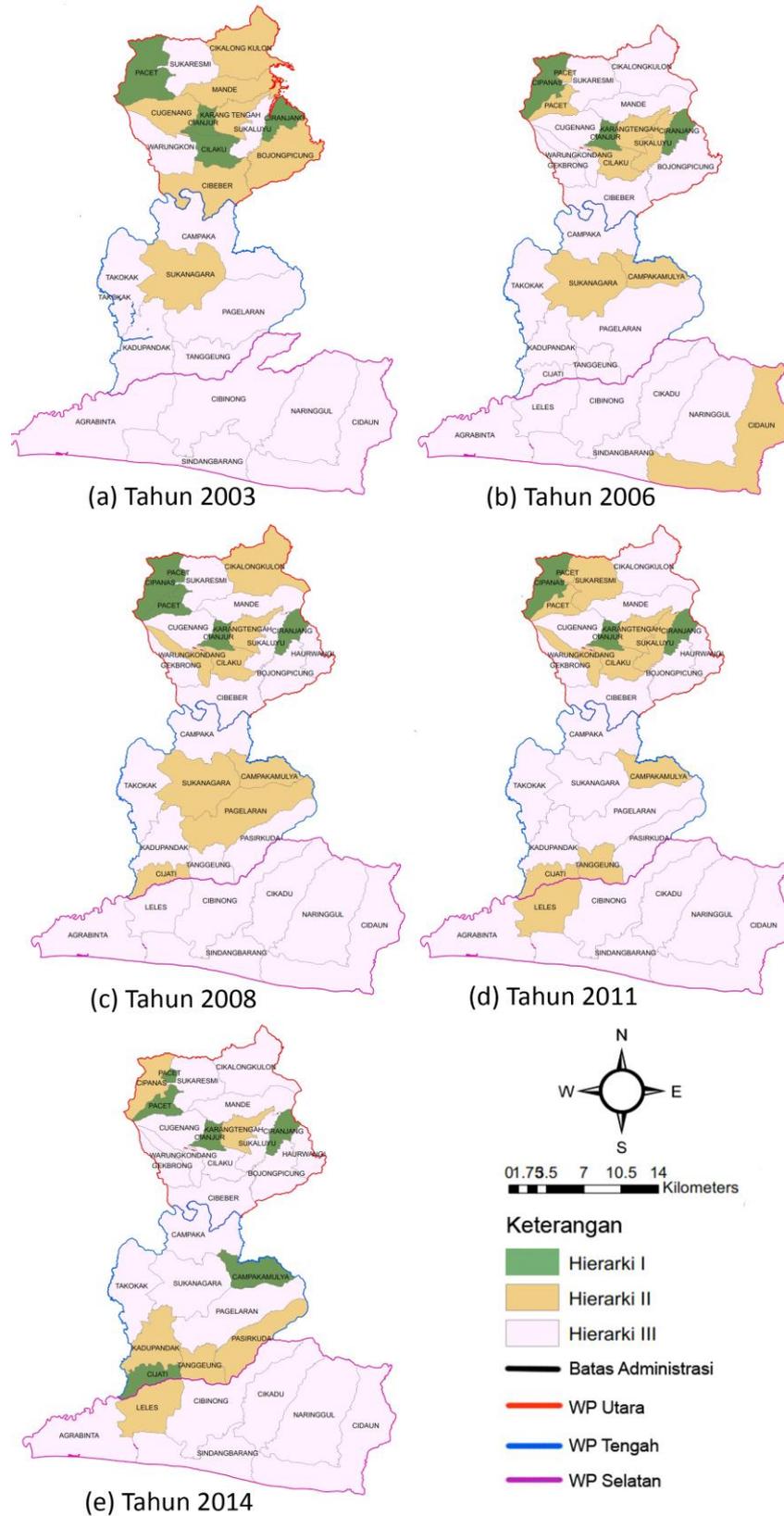
Kondisi pemerataan pembangunan dapat dilihat dari ada atau tidaknya ketimpangan wilayah. Semakin kecil nilai ketimpangan menunjukkan semakin meratanya pembangunan. Hasil analisis Indeks Theil sebagaimana disajikan pada Tabel 2 dengan grafik perkembangan disajikan pada Gambar 5 menunjukkan bahwa secara keseluruhan pemerataan pembangunan wilayah di Kabupaten Cianjur kurun waktu 2003-2014 mengalami fluktuasi namun cenderung menurun. Hal tersebut tidak terlepas dari semakin meningkatnya nilai ketimpangan yang diukur dengan Indeks Theil antara kondisi awal tahun analisis sebesar 0.0286 menjadi 0.0512 diakhir tahun analisis. Keadaan ini terjadi karena proporsi pembangunan yang tidak sama dan hanya terkonsentrasi di beberapa kecamatan. Sesuai penelitian Aprianoor dan Muktiali (2015) yang mengkategorikan Kabupaten Cianjur ke dalam tipe *low-3* dalam tipologi ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Barat. Penyebabnya adalah kurang memiliki sarana dan prasarana wilayah yang memadai serta kondisi infrastruktur seperti jalan yang masih buruk. Meningkatnya nilai ketimpangan pembangunan antarwilayah membuktikan kebenaran hipotesis awal penelitian bahwa semakin melebarnya gini rasio ketimpangan antargolongan pendapatan penduduk terjadi pula pada semakin melebarnya ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Tabel 2. Dekomposisi Indeks Theil Tahun 2003, 2006, 2008, 2011 dan 2014

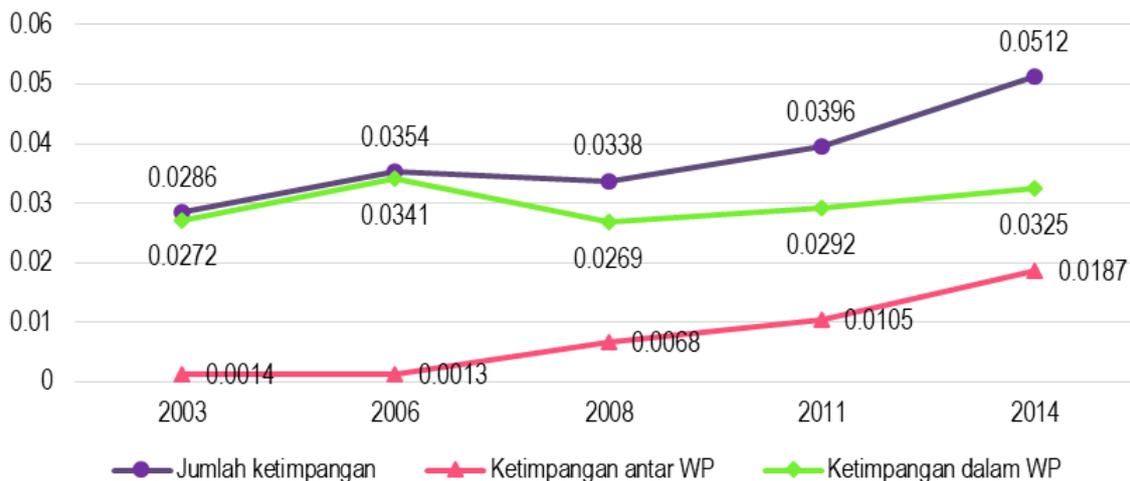
Tahun	Dekomposisi Ketimpangan	Indeks Theil			Total
		WP Utara	WP Tengah	WP Selatan	
2003	Antar WP	0.0171	-0.0080	-0.0070	0.0014
	Dalam WP	0.0214	0.0032	0.0025	0.0272*
	Jumlah	0.0386*	-0.0048	-0.0052	0.0286
2006	Antar WP	-0.0152	0.0126	0.0039	0.0013
	Dalam WP	0.0182	0.0125	0.0035	0.0341*
	Jumlah	0.0030	0.0251*	0.0073	0.0354
2008	Antar WP	-0.0288	0.0361	-0.0005	0.0068
	Dalam WP	0.0126	0.0096	0.0047	0.0269*
	Jumlah	-0.0162	0.0457*	0.0042	0.0338
2011	Antar WP	-0.0391	0.0426	0.0069	0.0105
	Dalam WP	0.0091	0.0124	0.0077	0.0292*
	Jumlah	-0.0300	0.0550*	0.0146	0.0396
2014	Antar WP	-0.0523	0.0577	0.0134	0.0187
	Dalam WP	0.0078	0.0198	0.0049	0.0325*
	Jumlah	-0.0445	0.0775*	0.0183	0.0512

Sumber: Hasil olah data Indeks Theil.

Keterangan: *) Nilai tertinggi sumber utama ketimpangan



Gambar 4. Sebaran Spasial Hierarki Wilayah (a) Tahun 2003, (b) Tahun 2006, (c) Tahun 2008, (d) Tahun 2011, dan (e) Tahun 2014



Gambar 5. Grafik Perkembangan ketimpangan pembangunan wilayah berdasarkan Indeks Theil

Hasil dekomposisi Indeks Theil (lihat Tabel 2) menunjukkan bahwa sumber utama ketimpangan di Kabupaten Cianjur pada setiap titik tahun analisis adalah ketimpangan antar kecamatan dalam WP. Pada tahun 2003 ketimpangan dalam WP menyumbang 95.16% terhadap jumlah keseluruhan ketimpangan. Nilai ketimpangan terbesar di WP Utara sebesar 0.0386 yang berarti ketimpangan antar di WP Utara sangat lebar. Sementara WP Tengah dan WP Selatan memiliki nilai ketimpangan minus dengan arti meratanya pembangunan di wilayah tersebut. Namun perlu diperhatikan bahwa di WP Tengah dan WP Selatan kondisi pemerataan pembangunan berada pada merata rendah.

Pada tahun 2006 ketimpangan dalam WP menyumbang 96.22% terhadap jumlah keseluruhan ketimpangan. Nilai ketimpangan terbesar berada di WP Tengah yakni 0.0251 yang berarti jarak ketimpangan pembangunan antar kecamatan di WP Tengah sangat lebar. WP Utara memiliki nilai ketimpangan paling kecil yakni 0.0030 yang berarti pembangunan antar kecamatan di WP Utara semakin merata. Sementara WP Selatan juga memiliki nilai ketimpangan kecil sebesar 0.0073, namun dalam kondisi merata rendah.

Pada tahun 2008 ketimpangan dalam WP menyumbang 71.89% terhadap jumlah keseluruhan ketimpangan. Nilai tertinggi berada di WP Tengah sebesar 0.0457 dengan arti jarak ketimpangan antar kecamatan di WP Tengah semakin melebar. WP Utara memiliki nilai ketimpangan paling kecil yakni -0.0162 yang berarti pembangunan antar kecamatan di WP Utara semakin merata. Sementara WP Selatan juga memiliki nilai ketimpangan kecil sebesar 0.0042, namun dalam kondisi merata rendah.

Pada tahun 2011 ketimpangan dalam WP menyumbang 73.62% terhadap jumlah keseluruhan ketimpangan. Nilai ketimpangan tertinggi di WP Tengah sebesar 0.0550 dengan arti jarak ketimpangan antar kecamatan di WP Tengah semakin melebar. WP Utara memiliki nilai ketimpangan paling kecil yakni -0.0300 yang berarti pembangunan antar kecamatan di WP Utara semakin merata. Sementara WP Selatan memiliki nilai ketimpangan kecil sebesar 0.0146, namun dalam kondisi merata rendah.

Pada tahun 2014 ketimpangan dalam WP menyumbang 63.45% terhadap jumlah keseluruhan ketimpangan. Nilai ketimpangan tertinggi berada di WP Tengah sebesar 0.0775 dengan arti jarak ketimpangan antar kecamatan di WP Tengah semakin melebar. WP Utara memiliki nilai ketimpangan paling kecil yakni -0.0445 yang berarti pembangunan antar kecamatan di WP Utara semakin merata. Sementara WP Selatan memiliki nilai ketimpangan kecil sebesar 0.0183, namun dalam kondisi merata rendah.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan

Berdasarkan hasil uji Hausman dengan *p-value* sebesar 0.8624 maka model data panel statis yang terpilih adalah model *random effect*. Setelah dilakukan uji Hausman dan diperoleh model yang paling sesuai, maka dilakukan estimasi dari persamaan. Hasil estimasi persamaan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan di Kabupaten Cianjur sebagaimana disajikan pada Tabel 3 menunjukkan nilai *R-square* sebesar 0.6105, artinya model mampu menjelaskan variasi pembangunan sebesar 61.05%. Sedangkan 38.95% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model.

Tabel 3. Hasil Estimasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembangunan di Kabupaten Cianjur

Variabel bebas	Koefisien	Std. Error	Probabilitas
AGRI	0.0579	0.2246	0.7970
ELECTRIC	0.9498	0.2258	0.0000*
POP	0.2905	0.1027	0.0050*
POOR	-0.3745	0.1470	0.0110*
Cons	0.3578	1.5286	0.8150
<i>R-squared</i>	0.6105		

Keterangan: *) signifikan pada $\alpha < 5\%$

Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel *independent* persentase rumah tangga pengguna listrik dan kepadatan penduduk berpengaruh signifikan dengan nilai koefisien positif, sementara variabel jumlah keluarga miskin berpengaruh signifikan dengan nilai koefisien negatif. Variabel yang memiliki koefisien bernilai positif memiliki arti setiap peningkatan variabel berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan. Sementara variabel yang memiliki koefisien negatif memiliki arti setiap peningkatan variabel berpengaruh terhadap penurunan pembangunan. Sedangkan variabel produktivitas padi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi karena data yang digunakan tidak sesuai dengan konteks persamaan ini.

Interpretasi pada masing-masing variabel yakni variabel persentase rumah tangga pengguna listrik dengan tingkat elastisitas 0.9498, artinya setiap kenaikan 1% jumlah persentase rumah tangga pengguna listrik akan meningkatkan tingkat IPK (sebagai indeks pembangunan) sebesar 0.9498% dengan asumsi variabel lain dianggap tetap (*ceteris paribus*). Bila dibandingkan antar ketiga variabel signifikan, persentase rumah tangga pengguna listrik paling besar pengaruhnya terhadap indeks pembangunan. Hal ini terjadi karena penggunaan listrik sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi (Dong dan Hao 2017). Sesuai dengan penelitian Prasetyo dan Firdaus (2009) yang menyatakan energi listrik sangat penting dalam kegiatan produksi. Ketersediaan energi listrik bagi masyarakat di Kabupaten Cianjur merupakan hal penting dan sangat berpengaruh dalam menggerakkan roda perekonomian untuk mendukung percepatan pembangunan karena sampai akhir tahun 2015, Rasio Elektrifikasi (RE) di Kabupaten Cianjur baru mencapai 82.74% atau masih terdapat 107,584 rumah tangga yang belum menggunakan listrik.

Variabel kepadatan penduduk dengan tingkat elastisitas 0.2905 memiliki arti setiap kenaikan 1% kepadatan penduduk akan meningkatkan indeks pembangunan sebesar 0.2905%, *ceteris paribus*. Banyak pandangan yang menyatakan kondisi kependudukan akan mempengaruhi pembangunan yang dilaksanakan baik berpengaruh positif maupun negatif. Pandangan yang dikemukakan Klasen dan Nestmann (2006) menyatakan kepadatan penduduk pada suatu wilayah akan menghasilkan interaksi sosial ekonomi masyarakat yang tinggi seperti tingkat pengeluaran publik. Selain itu, kepadatan penduduk yang lebih tinggi biasanya berhubungan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pula (Meyer 2016). Kepadatan penduduk mendorong peningkatan pembangunan mengingat di Kabupaten Cianjur wilayah dengan tingkat pembangunan lebih tinggi dan penduduk yang

lebih padat berada di Wilayah Cianjur Utara, sehingga mengakibatkan terkonsentrasinya kegiatan-kegiatan ekonomi serta jangkauan pelayanan sarana prasarana dan infrastruktur wilayah lebih efisien (Latuconsina 2017).

Variabel jumlah keluarga miskin dengan tingkat elastisitas -0.3745 , artinya setiap kenaikan 1% jumlah keluarga miskin akan menurunkan indeks pembangunan sebesar 0.3745%, *ceteris paribus*. Hal ini disebabkan angka kemiskinan berkaitan dengan kemampuan ekonomi masyarakat untuk dapat hidup layak seperti daya beli, serta menunjukkan kegiatan perekonomian suatu wilayah. Pengentasan kemiskinan dan pembangunan mencerminkan kemajuan ekonomi dan sosial (Liu *et al.* 2017). Menurut data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada tahun 2015 jumlah keseluruhan rumah tangga dan individu dengan kondisi kesejahteraan 21% sampai dengan 10% terendah di Kabupaten Cianjur (desil 3) masih cukup tinggi yakni berjumlah 90,946 rumah tangga dan 225,992 jiwa.

Arahan Rencana dan Strategi Pembangunan Wilayah

Hasil penelitian menunjukkan perkembangan wilayah di Kabupaten Cianjur saat ini masih didominasi oleh kecamatan-kecamatan dengan tingkat perkembangan rendah serta memiliki nilai ketimpangan pembangunan yang terus meningkat. Selain itu, pembangunan di Kabupaten Cianjur secara signifikan dipengaruhi oleh faktor persentase rumah tangga pengguna listrik dan kepadatan penduduk dengan koefisien positif, serta faktor jumlah keluarga miskin dengan koefisien negatif. Sehingga arah kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan wilayah kedepannya Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan kondisi faktual yang terjadi melalui rencana dan strategi yang mampu menciptakan pemerataan diseluruh wilayah.

Prinsip utama dalam arahan rencana dan strategi pembangunan Kabupaten Cianjur adalah fokus pada pemerataan pembangunan diseluruh kecamatan, dengan strategi dan implementasi yang dapat digunakan yakni: (1) Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah pada kecamatan-kecamatan yang difungsikan sebagai pusat kegiatan wilayah dan masyarakat namun masih memiliki tingkat perkembangan rendah meliputi kecamatan: Sindangbarang (PKL), Sukanagara (PKL), Warungkondang (PPK), Pagelaran (PPK), Cidaun (PPK), Cikalongkulon (PPL), Bojongpicung (PPL), Takokak (PPL), Cibinong (PPL), Naringgul (PPL Wilayah Selatan), dan Agrabinta (PPL); (2) Penetapan indikator pemerataan pembangunan antarwilayah dalam perencanaan pembangunan baik jangka panjang (RPJP) maupun jangka menengah (RPJMD) agar target dan capaian pemerataan pembangunan antarwilayah dapat terukur, selain indikator ketimpangan pendapatan antargolongan penduduk (indeks gini); (3) Penambahan jaringan listrik perlu segera dilaksanakan mengingat Rasio Elektrifikasi (RE) baru mencapai 82.74% melalui pembangunan pembangkit listrik yang telah direncanakan, serta untuk wilayah yang sulit dijangkau rencana pengembangan energi alternatif harus segera direalisasikan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); (4) Pembukaan lapangan kerja diseluruh wilayah harus dilaksanakan untuk mendistribusikan kesempatan kerja secara lebih merata dan mencegah urbanisasi, sehingga kepadatan penduduk tidak terkonsentrasi di wilayah utara; dan (5) Program pengentasan kemiskinan yang telah dicanangkan perlu segera dilaksanakan dan ditingkatkan cakupannya disertai dengan merivitalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan menciptakan kemitraan baru untuk pengentasan kemiskinan dengan memobilisasi perusahaan, kelompok sosial dan individu secara penuh untuk berpartisipasi dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan (Liu *et al.* 2015).

KESIMPULAN

Tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Cianjur pada umumnya mengalami peningkatan IPK, namun sebagian besar kecamatan masih memiliki tingkat perkembangan wilayah rendah. Kondisi pemerataan pembangunan wilayah di Kabupaten Cianjur cenderung mengalami penurunan akibat semakin meningkatnya nilai ketimpangan pembangunan antarwilayah. Pembangunan di Kabupaten Cianjur secara signifikan dipengaruhi oleh faktor persentase rumah tangga pengguna listrik, kepadatan penduduk, dan jumlah keluarga miskin. Oleh karena itu perencanaan pembangunan ke depan harus mempertimbangkan kondisi faktual yang terjadi dengan rencana dan strategi yang mampu menciptakan pemerataan diseluruh wilayah melalui pengembangan pusat pertumbuhan wilayah, penetapan indikator pemerataan pembangunan, penambahan jaringan listrik, pembukaan lapangan kerja diseluruh wilayah, dan program percepatan pengentasan kemiskinan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Pusbindiklatren Bappenas) yang telah mendukung pendanaan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianoor P, Mukhtali M. 2015. Kajian Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Teknik PWK*. 4:484–498.
- Arsovska M. 2017. Analysis of the Policy of Balanced Regional Development of Republic of Macedonia. *Vizione* 28:453–467.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur. 2017. Kabupaten Cianjur dalam Angka. Cianjur (ID): Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur.
- Dong X, Hao Y. 2017. Would Income Inequality Affect Electricity Consumption? Evidence from China. *Energy* 142:215–227.
- Faruqi I, Hadi S, Sahara. 2015. Analisis Potensi dan Ketimpangan Wilayah Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. *Tata Loka*. 17:231–247.
- Febrianty S, Sela R, Tilaar S. 2015. Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Wilayah Kota Tidore. *Jurnal Spasial*. 1:62–69.
- Firdaus M. 2011. Aplikasi Ekonometrika untuk Data Panel dan Time Series. Bogor (ID): IPB Press.
- Firdaus M. 2013. Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Indonesia: Fakta dan Strategi Inisiatif. [Orasi Ilmiah]. Institut Pertanian Bogor.
- Firmansyah LA, Soetarto E, Kusnadi N. 2014. Regional Economic Development Strategy in Preparation for the Establishment of a New Autonomous Region in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 15:62–69.
- Giannias DA, Belokrilova O, Shevchenko I, Chepurko Y, Iakovlev A. 2000. Index Based Regional Analysis : The Case of the Former Soviet Union and Russia. *Journal Economics of Planning*. 33:71–83.
- Herath S. 2017. Planning Sustainable Cities and Regions : Towards More Equitable Development. *Urban Policy Research*. 1146:1–4.
- Klasen S, Nestmann T. 2006. Population, Population Density and Technological Change. *Population Economics*. 19:611–626.
- Latuconsina Z. 2017. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Berbasis Pendekatan Perwilayahan dan Regresi Panel. *Regional and Rural Development Planning*. 1:202–216.
- Liu Q, Yu M, Wang X. 2015. Poverty Reduction within the Framework of SDGs and Post-2015 Development Agenda. *Advances in Climate Change Research*. 6:67–73.
- Liu Y, Liu J, Zhou Y. 2017. Spatio-Temporal Patterns of Rural Poverty in China and Targeted Poverty Alleviation Strategies. *Journal of Rural Studies*. 52:66–75.

- Lu S, Jiang H, Liu Y, Huang S. 2017. Regional disparities and influencing factors of Average CO₂ Emissions from transportation industry in Yangtze River Economic Belt. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*. 57:112–123.
- Meyer D. 2016. The Formulation of a Composite Regional Development Index. *Business and Management Studies*. 8:100–116.
- Nofita S, Sitorus S, Sutandi A. 2016. Arahan Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Sawah di Kota Solok. *Tata Loka* 18:118–130.
- Nusantara AW. 2014. The Analyzes Of Scalogram , Performance-Importance And Hierarchy Process For Grand Strategy Of The Agro-Industry Development In Southeast Sulawesi. *Humanities and Social Science Invention*. 3:40–45.
- Panuju D, Rustiadi E. 2013. *Teknik Analisis Perencanaan Pengembangan Wilayah*. Bogor (ID): DITSL-Faperta IPB.
- Prasetyo RB, Firdaus M. 2009. Pengaruh Infrastruktur pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*. 2:222–236.
- Pravitasari A. 2009. *Dinamika Perubahan Disparitas Regional di Pulau Jawa Sebelum dan Setelah Kebijakan Otonomi Daerah*. [Tesis]. Institut Pertanian Bogor.
- Rahman. 2009. *Analisis Disparitas Pembangunan Antar Wilayah di Kabupaten Sambas*. [Tesis]. Institut Pertanian Bogor.
- Rustiadi E, Saefulhakim S, Panuju D. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Bogor (ID): Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia.
- Schrott L, Martin G, Engelbert T. 2015. Regional Development in Advanced Countries: a Within-Country Application of the Human Development Index for Austria. *DANUBE: Law and Economics Review*. 6:1–23. doi:10.1515/danb-2015-0001.
- Sinha A, Rastogi S. 2015. Inequality in Access to Improved Water Source: A Regional Analysis by Theil Index. *Theoretical Economics Letters*. 5:683–690.
- World Economic Forum. 2018. *The Inclusive Development Index 2018 Summary and Data Highlight*. Jenewa.
- Yu W, Qing T, Qin L, Li H. 2015. Fairness or Not? Health Resources Allocation in Chongqing-Based on Theil Index. *Social Sciences*. 3:117–123.